

Bank Pertanian untuk Menjawab Pembiayaan Usaha Pertanian?

Prof. Dr. Bustanul Arifin

barifin@uwalumni.com

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA
Dewan Pendiri/Ekonom Senior INDEF, Jakarta
Professorial Fellow di Program MB-IPB, Bogor

Bahan pada Seminar IPB-BI-Deptan "Menuju4u Pendirian Bank Pertanian", 11 Mei 2009 di Bogor

Sistematika Penyajian

1. Perjalanan "jatuh-bangun" pertanian Indonesia
2. Tantangan baru ekonomi pangan dan pertanian
3. Tiga masalah strategis pembiayaan usaha pertanian
4. Tiga solusi strategis pembiayaan usaha pertanian
5. Pengalaman dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
6. Resi gudang: pembiayaan dan perlindungan harga
7. Penutup: Bank Pertanian tentu hanya salah satu

Proses “jatuh-bangun” pertanian Indonesia

| Uraian Sub-sektor | Konso- lidasi 1967-78 | Tumbuh Tinggi 1978-86 | Dekon struksi 1986-97 | Periode Krisis 1997-00 | Desen- tralisasi 2001-06 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| PDB Petanian | 3.39 | 5.72 | 3.38 | 1.57 | 3.45 |
| ➤ Tan.Pangan | 3.58 | 4.95 | 1.90 | 1.62 | 2.63 |
| ➤ Perkebunan | 4.53 | 5.85 | 6.23 | 1.29 | 4.10 |
| ➤ Peternakan | 2.02 | 6.99 | 5.78 | -1.92 | 4.47 |
| ➤ Perikanan | 3.44 | 5.15 | 5.36 | 5.45 | 4.20 |

Sumber: Dihitung Arifin dari data BPS dan FAOSTAT (Arifin, 2007)

Fenomena Pertumbuhan Produksi Padi

| Tahun | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (ton/ha) | Produksi (Ton) | Pertumbuhan (%) |
|-------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 2002 | 11.521.166 | 4,47 | 51.489.694 | 2,04 |
| 2003 | 11.488.034 | 4,54 | 52.137.604 | 1,26 |
| 2004 | 11.922.974 | 4,54 | 54.088.468 | 3,74 |
| 2005 | 11.839.060 | 4,57 | 54.151.097 | 0,12 |
| 2006 | 11.786.430 | 4,62 | 54.454.937 | 0,56 |
| 2007 | 12.147.637 | 4,71 | 57.157.435 | 4,76 |
| 2008 | 12.343.617 | 4,88 | 60.279.897 | 5,46 |
| 2009* | 12.422.456 | 4.91 | 60.931.912 | 1.13 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai tahun

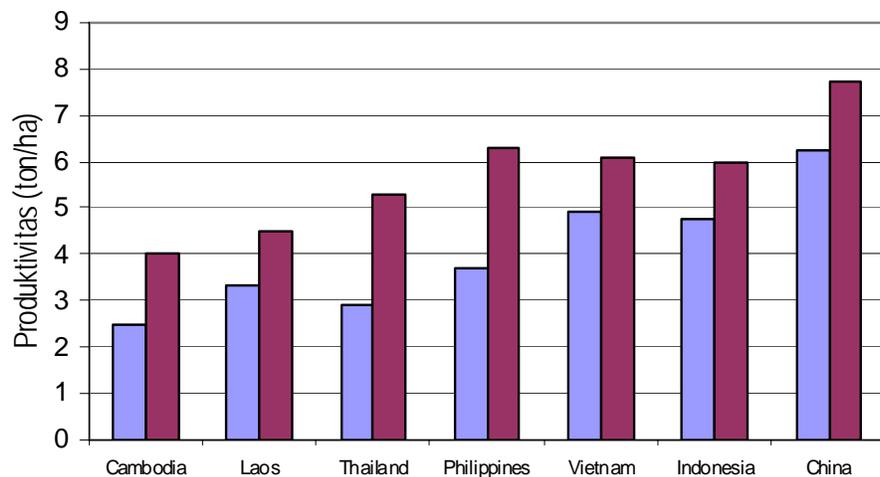
Misteri Indeks Pertanian (IP) Padi Sawah

| Tahun | Jawa | Luar Jawa | Indonesia |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 2001 | 158.44 | 112.58 | 132.12 |
| 2002 | 143.14 | 107.09 | 122.92 |
| 2003 | 178.38 | 120.59 | 144.03 |
| 2004 | 168.87 | 111.12 | 133.96 |
| 2005 | 188.89 | 119.67 | 148.33 |
| 2006 | 162.42 | 107.67 | 128.19 |
| 2007 | 233.85 | 125.12 | 161.09 |
| 2008 | | | |

IP= Perbandingan luas tanam dawah terhadap luas baku lahan sawah 7.8 juta ha (dalam %)

Sumber: BPS (2008)

Produktivitas Beras Aktual vs Potensial

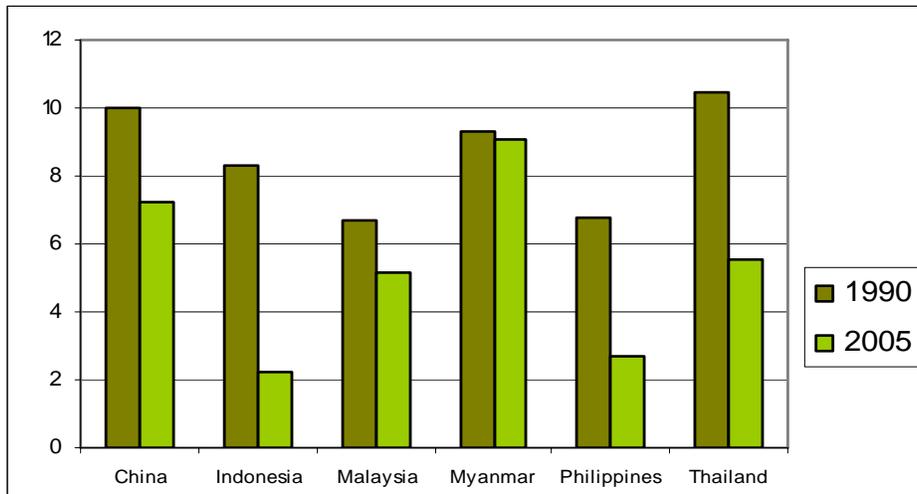


Kesenjangan produktivitas beras (*yield gap*) 25% (Bank Dunia, 2009)

Karena penyuluhan "sudah mati", atau sebab strategis/ideologi lain?

Politik Pertanian tanpa Komitmen: Ironi

Data Bank Dunia: Alokasi anggaran pertanian dan pedesaan di Asia (%PDB)



Belanja pemerintah untuk barang publik (jaringan irigasi, penyuluhan, R&D) jauh lebih efektif dibanding belanja subsidi barang privat (pupuk, benih dsb)

Persoalan Besar: Infrastruktur Pertanian



Fenomena Pertumbuhan Produksi Padi

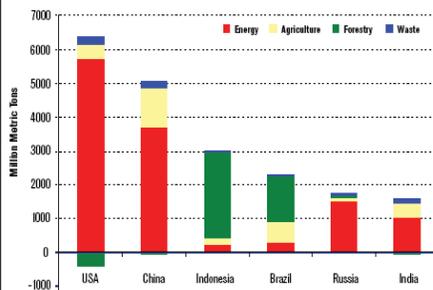
| Tahun | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (ton/ha) | Produksi (Ton) | Pertumbuhan (%) |
|--------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 2002 | 11.521.166 | 4,47 | 51.489.694 | 2,04 |
| 2003 | 11.488.034 | 4,54 | 52.137.604 | 1,26 |
| 2004 | 11.922.974 | 4,54 | 54.088.468 | 3,74 |
| 2005 | 11.839.060 | 4,57 | 54.151.097 | 0,12 |
| 2006 | 11.786.430 | 4,62 | 54.454.937 | 0,56 |
| 2007 | 12.124.287 | 4,71 | 57.051.679 | 4,76 |
| 2008*) | 12.343.617 | 4,88 | 60.279.897 | 5,66 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai tahun

Tantangan Baru Ekonomi Pangan & Pertanian

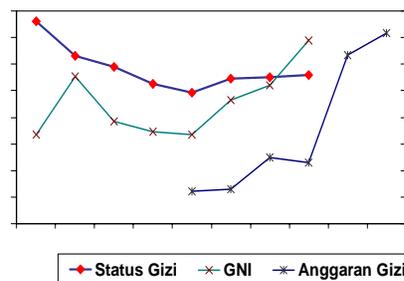
- Krisis ekonomi global, permintaan pangan untuk biofuel, perubahan struktur perdagangan pangan
- Perubahan iklim: kecenderungan sektor pertanian dijadikan elemen perundingan IPCC pasca 2012
- Tujuan pembangunan milenium (MDG), mengurangi kemiskinan dan kelaparan setengah.

Penghasil Emisi Gas CO₂ Global



Sumber: Bank Dunia, 2007

Pendapatan, Status, Anggaran Gizi



Sumber: Thaha, 2008

Dampak nyata perubahan iklim pada produksi pangan strategis tahun 2050

| Komoditas | Produksi 2006 (ton) | Penurunan Produksi Pangan Tahun 2050 | |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|------|
| | | (ton) | (%) |
| Padi Sawah | 51.647.490 | 10.473.764 | 20,3 |
| Padi Ladang | 2.807.477 | 761.522 | 27,1 |
| Jagung | 11.609.463 | 1.574.966 | 13,6 |
| Kedelai | 747.611 | 92.503 | 12,4 |
| Tebu | 1.279.070 | 97.453 | 7,6 |

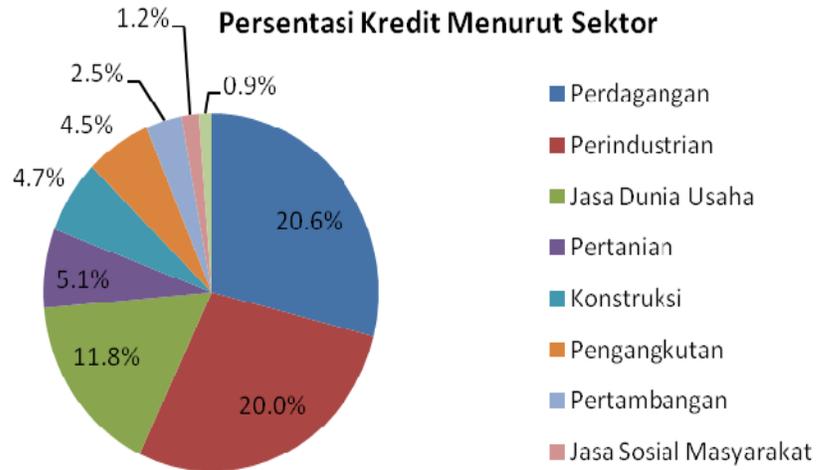
Sumber: Handoko et al, (2008)

Sawah di Jawa hilang 113 ribu ha (jika air laut naik 0.5 m) & 146.5 ribu ha (jika air laut naik 1 m)

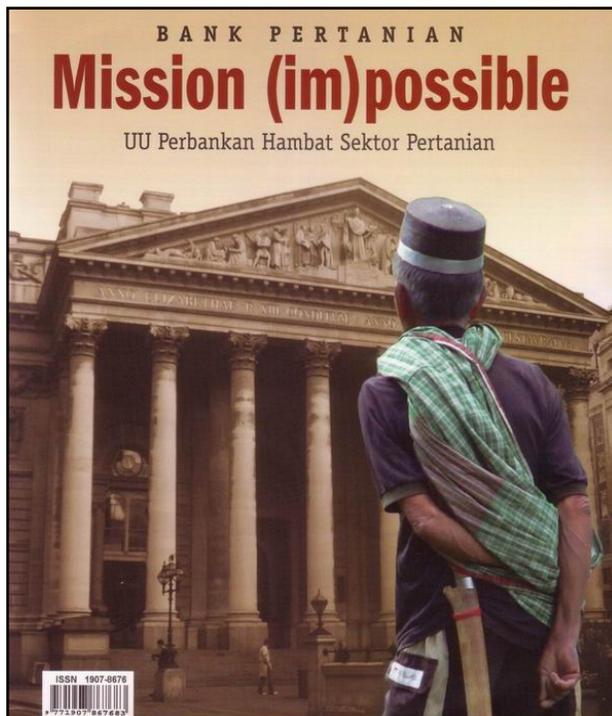


Sumber: Handoko et al, (2008)

Persentase Kredit menurut Sektor Ekonomi



Sumber: Bank Indonesia, Kegiatan Usaha Bank Umum Menurut Sektor, Agustus 2008



Masalah Struktural Pembiayaan Pertanian

- Minimnya informasi plus buruknya komunikasi antara perbankan dan sektor pertanian
- Dualisme struktural pembiayaan agribisnis modern (skala besar) vs pertanian rakyat skala kecil/tak menguntungkan
- Pragmatisme mikro bisnis perbankan dan skeptisme makro kebijakan

(1) Sistem informasi-komunikasi yang buruk antara perbankan dan sektor pertanian

- Pelaku pertanian kurang aktif menyampaikan peluang bisnis & prospektif usaha pertanian kepada lembaga pembiayaan. Sektor pertanian kurang atraktif bagi perbankan.
- Perbankan tidak memiliki pemahaman lengkap tentang prospek sektor pertanian. Mereka hanya mengetahui bahwa pertanian isangat berisiko (*high risk*), tergantung musim, jaminan harga yang tidak pasti, dsb.
- Pertanian masih dianggap kumuh, miskin, pendidikan rendah, mandi keringat, terbenam dalam lumpur dsb, walaupun sebenarnya, high risk juga dapat berarti high return;
- Pelaku perbankan idak mau tahu tentang kemajuan yang telah dicapai oleh dunia agribisnis sebagai suatu budaya baru, yangditangani oleh eksekutif dan manajer yang profesional.

(2) Dualisme sistem pembiayaan

- Perhatian perbankan terfokus pada agribisnis modern dan perkebunan besar, berseida bersedia "mendatangi" dan melakukan deal bisnis dengan sektor agribisnis dengan pola manajemen modern.
- Bankir masih harus patuh pada prudential banking, bersikap sangat hati-hati dan agak resisten untuk berhubungan langsung dengan petani kecil, tinggal di pedesaan, berlumpur jika hujan dan berdebu jika kering.
- Sebaliknya, bankir tidak jarang menganggap bahwa petani kecil itu tidak pintar karena terdapat *prejudice* bahwa mereka tidak menawarkan marjin keuntungan yang memadai bagi lembaga keuangan.
- Berurusan dengan petani kecil dalam jumlah besar mengandung biaya transaksi yang cukup besar, mulai dari biaya inisiasi/ informasi, biaya organisasi/koordinasi, dan biaya penegakan suatu aturan.
- Jika dunia usaha pertanian "tidak menarik" bagi perbankan, cukup sulit bagi sektor perbankan untuk datang dan memberikan perhatian bagi sektor pertanian. Akan tetapi di lain pihak, tidak sedikit usaha agribisnis skala besar menjadi magnit tersendiri bagi sektor perbankan, karena prospek keuntungan yang cukup besar.

(3) Pragmatisme Mikro dan Skeptisme Makro

- Karena informasi yang tidak mengalir secara baik, maka bankir sangat jarang mau secara sungguh-sungguh membina dan menolong nasabah petani kecil agar sektor pertanian menjadi lebih atraktif dan *bankable*.
- Keputusan bisnis perbankan adalah ketentuan bank umum, yang tentu harus mengikuti prinsip-prinsip prudential banking, dan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
- Demikian pula, walaupun Bank Indonesia telah mencoba untuk menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), kebijakan ekonomi makro masih belum cukup untuk mendukung iklim kondusif bagi perkembangan dunia usaha.
- Akibatnya, sebagian besar bank di Indonesia masih merasa lebih aman untuk memanfaatkan bunga SBI, karena hal itu lebih dari cukup untuk menanggung operasional perbankan.

(1) Solusi Masalah Informasi-Komunikasi

- Sektor pertanian, perlu mampu mengemas diri agar lebih menarik dan didatangi oleh perbankan.
- Pemerintah mendorong berdirinya lembaga “jembatan” sektor pertanian dan perbankan, menjalankan fungsi penjaminan kredit pertanian, peningkatan kepastian usaha, perbaikan *property rights* sampai pada sertifikat kepemilikan lahan, dsb.
- *Stakeholders* perlu menindaklanjuti pendirian lembaga asuransi tanaman (*crop insurance*), untuk mengatasi risiko gangguan cuaca, kegagalan panen dan lain-lain.
- Manajemen subsidi perlu didisain khusus agar tidak langsung diberikan kepada petani, apalagi jika harus berakhir tidak produktif dan mengacaukan insentif.

(2) Solusi Masalah Dualisme Pembiayaan

- Perbankan perlu mengembangkan skema pembiayaan ke depan (*forward financing*), dengan tingkat bunga komersial biasa.
- Perbankan perlu memanfaatkan ketentuan perundangan baru tentang sistem resi gudang (*warehouse receipt system*) dan mulai berbicara serius dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sebagai titik fokal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 ttg Sistem Resi Gudang.
- Lembaga keuangan non-bank seperti modal ventura, lembaga peminjaman *leasing* dsb perlu senantiasa berinovasi, misalnya mengembangkan sistem penyertaan.
- Di negara-negara maju telah dikenal pembiayaan *direct lease*, skema *lease back* dsb, yg tidak mustahil dapat dikembangkan untuk sektor pertanian di Indonesia.

(2) Solusi Masalah Manajemen & Kebijakan

- Otoritas perbankan dalam negeri perlu mengembangkan gagasan baru untuk "mendidik kembali" para bankir agar mampu lebih mengerti dan memahami sektor pertanian. Maksudnya, diperlukan suatu keberanian dan terobosan pemihakan kebijakan perbankan yang lebih pro-pertanian.
- Misalnya melalui Peraturan Bank Indonesia yang mampu mendorong pemberian insentif bagi perbankan yang mampu membentuk unit khusus R&D yang fokus pada pembangunan pertanian.
- Kisah sukses PT Rabo Bank Indonesia yang memiliki 71 orang peneliti pembangunan pertanian tidak terlalu tabu untuk ditiru. Rabo didirikan dengan semangat koperasi pertanian, berorientasi pada kesejahteraan anggota (nasabah), ikut mempengaruhi perjalanan bisnis Rabo.

Pengalaman dari Kredit Usaha Rakyat

- KUR adalah kredit modal kerja dan kredit investasi dengan plafond s/d Rp 500 juta, yang diberikan kepada UMKM dan Koperasi yang memiliki usaha produktif dan feasible namun tidak mempunyai agunan yang cukup (dan akan mendapat jaminan dari Perusahaan Penjamin)
- Tujuan KUR: meningkatkan aktivitas perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.
- Besarnya penjaminan: Maksimal 70% dari plafon kredit
- Sumber dana KUR: 100% dari komersial perbankan
- Secara politis, KUR telah diluncurkan oleh Presiden SBY pada tanggal 5 November 2007 di Kantor BRI, Jakarta

Organisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bank Pelaksana KUR:

- Bank BRI
- Bank Mandiri
- Bank BNI
- Bank BTN
- Bank Bukopin
- Bank Syariah Mandiri

Instansi Teknis Pembina

1. Kem. Koperasi & UKM
2. Dep. Pertanian
3. Dep. Kelautan Perikanan
4. Dep. Perindustrian
5. Dep. Kehutanan
6. Instansi terkait lainnya

Perusahaan Penjamin

- Perum Sarana Pengembangan Usaha (perum SPU)
- PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo)

Bagaimana Mengakses KUR?

1. UMKM dan Koperasi yang membutuhkan Kredit dapat menghubungi Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.
2. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana.
3. Mengajukan surat permohonan kredit/ pembiayaan
4. Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan
5. Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit.

Tiga Skema KUR

KUR Ritel

- Plafon: Rp 5 juta s/d 500 juta
- Dilayani oleh seluruh 6 bank pelaksana

KUR Mikro

- Plafon: s/d Rp 5 juta
- Dilayani oleh BRI Unit (Pidato Presiden 18 Jan 2008)

KUR Linkage

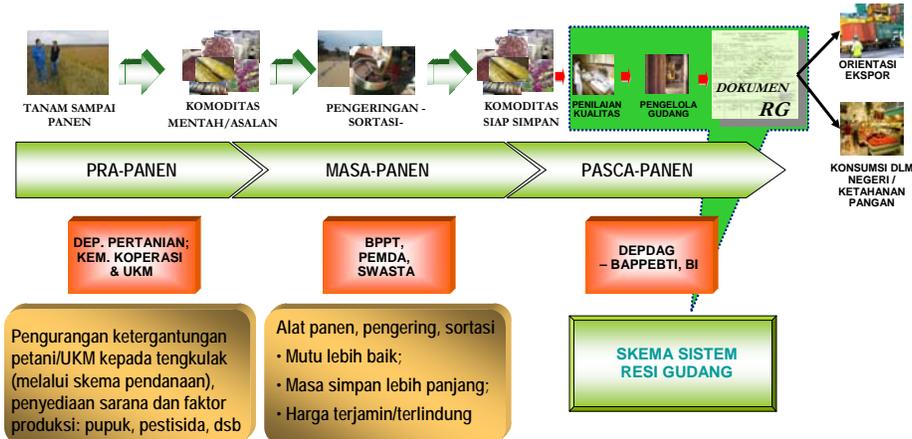
- Plafon: >Rp 5 juta s/d Rp 500 juta
- Dilayani oleh seluruh 5 bank pelaksana
- Linkage: BKD, KSP/USP, BMT, LKM lainnya
- Pinjaman LKM kepada *end-user*: maksimum Rp 5 juta

Target dan Realiasi KUR 2008

- Target dana tersalur pada tahun 2008 Rp 15 triliun, Realisasi per 31 Desember 2008 Rp 12,456 triliun
- Target debitur: 2 juta; Realisasi 1.656.544 debitur
- Skema terbesar KUR Ritel (56,2%), disusul KUR Mikro (44,8%). Nilai kredit rata-rata per debitur Rp. 7,52 juta
- Penyaluran KUR BRI: 68% dan debitur 95.7% nasional
- Sektor perdagangan menyerap KUR tertinggi (63,5%), disusul oleh sektor pertanian (20,9%). Sektor ekonomi lain menyerap KUR hanya sekitar 3 persen dari total.

Resi Gudang: Pembiayaan & Perlindungan Harga

Percontohan: Lampung (lada, kopi); Jawa Barat (gabah); Jawa Tengah (gabah dan jagung); Jawa timur (gabah); dan Sulawesi Selatan (gabah, kakao, jagung), dan lain-lain



Penutup: Bank Pertanian hanya salah satu

- Untuk menjawab masalah pembiayaan usaha pertanian, solusi bank pertanian tentu hanya salah satu. Solusi lain masih terbuka sangat lebar, mulai dari perbaikan infrastruktur, penelitian dan pengembangan (R&D) sampai kepada perbaikan dan penjaminan kebijakan ekonomi makro secara umum.
- Dukungan kebijakan untuk intervensi langsung dan pemihakan sektor pertanian, pengembangan industri pedesaan, pasca panen dan pengolahan, jasa dan perdagangan menjadi insentif untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan
- Dalam hal KUR, fokus ke depan perlu ke arah KUR Linkage, pengembangan produk jasa yang responsif terhadap krisis, misalnya sistem resi gudang dan sebagainya
- Di daerah, pemberian keleluasaan bagi perbankan cabang dan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan pemberian kredit;
- Terakhir, pada teknis perbankan, penguatan proses manajemen risiko (pada aset dan liabilities) tentu tidak dapat ditawar lagi.

(TIDAK) BERSAMA, KITA (TIDAK) BISA

